

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta:Rajawali Press, 2008
- Arie S. Hutagalung, Asas-asas Hukum Agraria, Tidak diterbitkan, Jakarta, 1997
- ,"*Asas-Asas Hukum Agraria*," Bahan bacaan pelengkap mata kuliah Hukum Agraria Depok, 2001
- Arlo Woorley, *The Art of Valuation*, Lexington Books, Massachusetts, D.C Heath Company, Toronto, 1978
- A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989
- , *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991
- Bagir manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII,Yogyakarta, 2001
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Bohari, SH., M.S., *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2002
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam (Dari masa klasik hingga kontemporer)*.Pustaka Asatruss Jakarta, Cet-I, April, Jakarta, 2005

Universitas Indonesia

Flora Pricilla Kalalo, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai & Laut di Indonesia* Buku I, Logoz Publishing, Jakarta, 2009

Gita Chandrika Napitupulu, *Isu Strategis dan Tantangan Dalam Pembangunan Perkotaan: Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Abad 21*, Buku I, Urban and Regional Development Institute (URDI) dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, Jakarta: 2005

Hadi Sabari Yunus. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000

Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Makroekonomi* (terj.), Edisi ke-14, Jakarta, erlangga, 1999

Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan: Dinamika Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Insist Press&Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1974

Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan 1985*, Eresco, Bandung, 1985

Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet.V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)

Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, Alumni, 1986

William Dillinger, *Urban Property Tax Reform Guidelines and Recommendation*, Urban Management Program (UMP), 1991

Yuswanda A. Temenggung, *Pengelolaan Pertanahan Perkotaan: KOnsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Penataan dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*, Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI (urban and regional development institute), Jakarta, 2005

MAKALAH

Joko Waluyo, *Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Pantai Utara Jakarta, Makalah pada seminar sehari Pelestarian Kawasan Mangrove Jakarta*, Jakarta, 27 September 2006

Wiratni Ahmadi, *Struktur Pajak dan Pungutan di Bidang Pertanahan*, Naskah akademik pada workshop nasional *Land Management and Policy Development Project*, Bappenas, 24 Oktober 2007

KARYA ILMIAH

Maria SW Sumardjono, 1998, *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*, dalam Pidato Pengukuhan

Universitas Indonesia

Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, tanggal 14 Februari 1998 di Yogyakarta

DOKUMEN PERUSAHAAN

Departemen Hukum PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk, *KRONOLOGI PEMBENTUKAN PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK*, Jakarta, 2005

PENELITIAN

Arie S. Hutagalung, *Penelitian Surat Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001 yang akan mempengaruhi isi dari Perjanjian HGB atau Hak-Hak Atas Tanah lainnya diatas HPL khususnya mengenai izin rekomendasi dari pemegang HPL*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

_____, Undang-Undang tentang Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960

_____, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004

_____, Undang-undang No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

_____, Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Universitas Indonesia

- _____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- _____, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- _____, Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- _____, Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal
- _____, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- _____, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 tahun1997
- _____, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- _____, PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
- _____, PP 13/2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Yang Berlaku
- _____, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005
- _____, *Keputusan Presiden Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta*, Kepres No. 52 Tahun 1995.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Tatacara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
- _____, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999
- _____, *Peraturan Menteri Negara Agraria Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA No. 3 tahun 1997.

- Jakarta, *Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta*, Perda No. 8 Tahun 1995.
- _____, *Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010* Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999.
- _____, SK.Gubernur DKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

ARTIKEL

Kompas,. *Mengapa Tak Mau Belajar Dari Pengalaman*.Dalam Harian Kompas, 11 April 2003 halaman 10

Kompas, *Reklamasi Pantai Jakarta Tidak Layak*. Dalam Harian Kompas, 11 April 2003 halaman 17 : Jakarta.

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia, 25 Agustus 2009

“Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, “<<http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta>,>”, 25 Agustus 2009

Osaka City Finance Bureau, City Planning Tax, Melalui

http://www.zaisei.city.osaka.jp/public/english/tax/city_plan.html [29/01/09]

Koran Tempo. BPHTB Jadi Penerimaan Daerah, Melalui

http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=4247 [29/01/09]

www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/6442/Pemprov-DKI-Akan-Reklamasi-Pantai-Utara-Jakarta

<http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation>, dipunggah tanggal 17 Maret 2010

<http://en.wikipedia.org/wiki/reclamation>, dipunggah tanggal 17 Maret 2010

Universitas Indonesia

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reclamation, dipunggah tanggal 24 Maret 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_reclamation, dipunggah tanggal 24 Maret 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/River_reclamation, dipunggah tanggal 24 Maret 2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Mine_reclamation, dipunggah tanggal 24 Maret 2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Impian_Jaya_Ancol, dipunggah tanggal 24 Maret 2010

<http://ariesaksono.wordpress.com/2008/11/13/kawasan-ancol-dulu-dan-sekarang>,
dipunggah 24 Maret 2010

